

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JKSS) Kota Pariaman dapat disimpulkan bahwa :

#### a. *Input*

1. Kebijakan tentang Pelaksanaan JKSS mengacu kepada Peraturan Walikota No. 13 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Pariaman No.20 Tahun 2012, Perda No.20 tahun 2012 tentang Penyelenggaran JKSS, Perjanjian Kerjasama antara Dinkes dengan RSUD Pariaman, RSUP M.Djamil, RSJ HB Saanin Padang serta buku petunjuk pelaksanaan JKSS Kota Pariaman.
2. Tenaga pelaksana JKSS sudah ada, namun masih memanfaatkan tenaga yang ada. Belum adanya standar pendidikan dan pelatihan/keterampilan khusus bagi pengelola program JKSS Kota Pariaman.
3. Sarana yang digunakan untuk JKSS belum mencukupi karena sarana masih digunakan secara bersama dengan program dan kegiatan lain. Sedangkan di Puskesmas dan Rumah Sakit telah mencukupi yaitu sarana pelayanan kesehatan.
4. Sumber dana berasal dari APBD Kota Pariaman sebesar Rp 2.543.320.744,00. Dan besaran biaya kesehatan yang diberikan maksimal Rp 10.000.000 setiap orang/tahun serta tidak ada sumber pembiayaan dari masyarakat kecuali diluar yang dijamin oleh JKSS.

b. Proses

1. Perencanaan untuk program JKSS tahun 2017 dituangkan dalam rencana kerja bentuk POA serta melibatkan lintas sektor yaitu aparat di kecamatan, desa dalam bentuk sosialisasi terkait kepesertaan JKSS kepada masyarakat.
2. Pengorganisasian JKSS sudah terbentuk tim-tim, namun Badan penyelenggara untuk JKSS ini belum ada.
3. Sosialisasi JKSS secara umum sudah dilakukan melalui spanduk, leaflet, brosur, radio dan turun langsung ke Kecamatan dan Desa namun perlu peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar mengerti dengan persyaratan pengguna JKSS dan alur pelayanan JKSS.
4. Verifikasi kepesertaan JKSS dilakukan di Dinkes namun dalam pelaksanaannya ditemukan masyarakat yang tidak taat aturan.
5. Pengawasan yang dilakukan untuk pelaksanaan JKSS telah baik, karena telah ada pengawasan langsung ke lapangan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman, namun pelaporan dari pihak PPK masih mengalami keterlambatan dan bentuk pencatatan laporan yang masih manual.

c. Output

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang pada tahun 2017 belum mencapai hasil yang optimal, ini terlihat masih adanya permasalahan terkait kepesertaan serta pengetahuan masyarakat terhadap alur pelayanan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang masih kurang, selain itu JKSS belum mempunyai badan penyelenggara resminya.

## 1.2 Saran

1. Diharapkan bagi Dinas Kesehatan Kota Pariaman untuk memberikan pelatihan khusus secara berkesinambungan kepada tenaga pengelola program JKSS Pariaman.
2. Diharapkan bagi Dinas Kesehatan Kota Pariaman agar dapat melengkapi sarana demi kelancaran program JKSS Pariaman.
3. Diharapkan agar Pemerintah Kota Pariaman dan Dinas Kesehatan untuk bekerjasama dan menjaminkan warga Kota Pariaman kepada Badan Penyelenggara yaitu BPJS.
4. Diharapkan agar seluruh pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan program JKSS untuk lebih meningkatkan sosialisasi agar peserta JKSS lebih mengetahui informasi mengenai program JKSS Kota Pariaman.
5. Diharapkan pihak Puskesmas dan Rumah Sakit lebih memahami mengenai manajemen penyelenggaraan program JKSS dan menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku baik dalam pelayanan, pelaporan maupun klaim. Dan menyerahkan laporan klaim sesuai dengan waktu kesepakatan yang telah disepakati bersama.

